



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : 0239 /M.PPN/07/2015
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Daftar Prioritas Proyek SBSN (DPP-SBSN TA.2016)

Jakarta, 31 Juli 2015

Yth. Menteri Keuangan
di Jakarta

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 13 PP No. 56 Tahun 2011 mengamanatkan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyusun Daftar Prioritas Proyek yang akan dibiayai melalui SBSN. Daftar Prioritas Proyek disusun berdasarkan usulan proyek yang disampaikan oleh pemrakarsa proyek (Kementerian/Lembaga) dan dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kesiapan, kelayakan, serta kesesuaian proyek dengan RPJMN, Batas Maksimum Penerbitan SBSN (BMP-SBSN), dan kesesuaian proyek dengan prinsip syariah.
2. Batas Maksimum Penerbitan (BMP) SBSN tahun 2016 ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui surat nomor S-175/MK.08/2015 tanggal 11 Maret 2015, yaitu sebesar Rp. 13,677 triliun.
3. Menteri Agama melalui surat nomor MA/119/2015 tanggal 15 Mei 2015, Menteri Perhubungan melalui surat nomor KU.008/1/2 A PHB 2015 tanggal 15 Juni 2015 dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat nomor KU.01.01-Mn/540 tanggal 3 Juli 2015 menyampaikan usulan proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN TA. 2016.
4. Berdasarkan penilaian Bappenas sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2011 Pasal 12 ayat (2), maka dapat disampaikan pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan Daftar Prioritas Proyek (DPP) SBSN TA. 2016 sebagai berikut:
 - a. Kementerian Agama
Proyek yang diusulkan oleh Kementerian Agama dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019, utamanya dalam Pembangunan Manusia dan Masyarakat melalui pelayanan asrama haji, pelayanan balai nikah dan manasik haji, dan pelayanan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAIN).
 - b. Kementerian Perhubungan
Proyek yang diusulkan oleh Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019, utamanya untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui pelaksanaan sub agenda membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi umum massal perkotaan.

c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Proyek yang diusulkan oleh Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019, utamanya dalam pengembangan jalan nasional, pembangunan jalan tol, dan pembangunan jalan baru.

5. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat ditetapkan DPP SBSN TA. 2016 untuk Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 13,677 triliun dengan rincian setiap kementerian sebagai berikut:

- a. Kementerian Agama sebanyak tiga proyek dengan nilai total Rp. 1,468 triliun;
- b. Kementerian Perhubungan sebanyak enam proyek dengan nilai Rp. 4,983 triliun; dan
- c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 7 kelompok proyek dengan nilai Rp. 7,226 triliun.

Rincian proyek terlampir.

6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya usulan proyek Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pembiayaan SBSN dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2011.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara Menteri, kami ucapkan terima kasih.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



Andriano A. Chaniago

Lampiran Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor : ~~0289~~ /M.PPN/07/2015

Tanggal : 31 Juli 2015

No	Instansi/Kegiatan/Proyek	Alokasi 2016 (Rp. Juta)
Kementerian Agama		1.467.900,0
1	Revitalisasi pengembangan asrama haji untuk 12 Embarkasi	885.000,0
2	Pembangunan balai nikah dan manasik haji untuk 181 KUA	182.900,0
3	Peningkatan sarana dan prasarana PTAIN untuk 11 PTAIN	400.000,0
Kementerian Perhubungan		4.983.000,0
1	Paket A (Pembangunan fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara)	1.220.000,0
2	Paket B2 (1) (Modernisasi Fasilitas Perkeretaapian untuk Jatinegara s/d Bekasi)	530.000,0
3	Pembangunan Jalur Ganda Martapura-Baturaja total sepanjang 35 Km'sp	523.139,6
4	Pembangunan Jalan KA Layang Diperkotaan Medan (Tahap 1 antara Medan-Bandar Khalifah Baru Lintas Medan-Araskabu-Kualanamu) termasuk supervisi	1.430.000,0
5	Pembangunan Jalur Ganda KA antara Purwokerto-Kroya Lintas Cirebon-Kroya Segmen III	689.090,1
6	Pembangunan Jalur Ganda Lintas Solo-Surabaya antara Madiun-Jombang	590.770,3
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		7.226.299,9
1	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo-Kertosono Seksi 1 (Myc)	432.725,5
2	Pelebaran Jalan Nasional	916.561,4
3	Pembangunan Jalan	1.706.730,0
4	Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan Nasional	827.140,0
5	Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan	684.257,6
6	Pembangunan Jembatan	2.439.945,4
7	Peningkatan Jembatan	218.940,0
Total		13.677.199,9